

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kota Pangkalpinang merupakan Ibukota dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diresmikan tepatnya pada tanggal 9 Februari 2001. Kota Pangkalpinang mempunyai slogan sebagai “ Kota Beribu Senyuman” yang memiliki makna yaitu Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur. Kota Pangkalpinang mempunyai luas wilayah sebesar 104 km². Hal tersebut dapat dikatakan bahwa Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini merupakan wilayah terkecil dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada yaitu hanya sebesar 0,72 persen dari luas wilayah provinsi seluruhnya. Secara astronomis Kota Pangkalpinang terletak diantara 02 03’-02 10’ Lintang Selatan dan 106 02’-106 12’ Bujur Timur (BPS, 2021). Sedangkan untuk letak geografis Kota Pangkalpinang berbatasan langsung dengan :

- a. Utara dan Barat : Kabupaten Bangka
- b. Selatan : Kabupaten Bangka Tengah
- c. Timur : Laut Cina Selatan

Secara administratif, Kota Pangkalpinang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bangka di sebelah Utara dan Barat. Berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah di sebelah Selatan dan berbatasan

dengan Laut Cina Selatan di sebelah Timur (BPS, 2021). Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan antara lain:

- a. Kecamatan Rangkui terdiri dari kelurahan Asam, Parit Lalang, Bintang, Melintang, Keramat, Masjid Jamik, Pintu Air, Gajah Mada.
- b. Kecamatan Bukit Intan terdiri dari kelurahan Semabung Lama, Bacang, Air Itam, Sinar Bulan, Temberan, Air Mawar, Pasir Putih; Kecamatan Girimaya: Sriwijaya, Bukit Besar, Batu Intan, Semabung Baru, Pasir Padi.
- c. Kecamatan Pangkal Balam terdiri dari kelurahan Ampui, Lontong Pancur, Pasir Garam, Rejosari, Ketapang.
- d. Kecamatan Gabek terdiri dari kelurahan Selindung Baru, Air Salemba, Gabek Satu, Gabek Dua, Selindung, Jerambah Gantung.
- e. Kecamatan Taman Sari terdiri dari kelurahan Rawa Bangun, Gedung Nasional, Opas Indah, Batin Tikal, Kejaksanaan.
- f. Kecamatan Gerunggang terdiri dari kelurahan Kacang Pedang, Tuatunu Indah, Bukit Merapin, Bukit Sari, Taman Bunga, Air Kepala Tujuh.

4.1.2 Keuangan Daerah

Keuangan Daerah merupakan suatu gambaran kekayaan yang menjadi hak dan kewajiban daerah seluruhnya. Kondisi keuangan daerah menggambarkan bagaimana keadaan suatu pemerintahan baik tatanan, kelembagaan, dan kebijaksanaan dalam mengelola Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi pendapatan Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp.915.529.305.548,73 dan mengalami peningkatan pada Tahun 2019 menjadi Rp.916.390.339.757,00. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp.883.544.427.815 (BAKEUDA, 2021).

Tabel IV.1 Gambaran Umum Realisasi Penerimaan Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019

Tahun	Total Penerimaan Daerah (Rp)
2015	797.819.738.788,00
2016	978.371.219.444,00
2017	868.376.081.020,00
2018	915.529.305.584,73
2019	916.390.339.757,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019, data diolah (2021)

Tabel IV.1 menunjukkan bahwa pada Tahun 2016, 2018 dan 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2017 penerimaan daerah mengalami penurunan dari Tahun 2016 menjadi Rp.868.376.081.020. Total penerimaan daerah tertinggi terjadi pada Tahun 2016 sebesar Rp.978.371.219.444 dan terendah terjadi pada Tahun 2015 sebesar Rp.797.819.738.788.

4.2 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis kinerja keuangan daerah digunakan untuk mengetahui posisi keuangan suatu daerah dalam mencapai tujuan kegiatan fiskal pemerintah daerah serta untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Analisis kinerja keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

4.2.1 Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas digunakan untuk mengetahui sukses tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan daerah dengan target penerimaan.

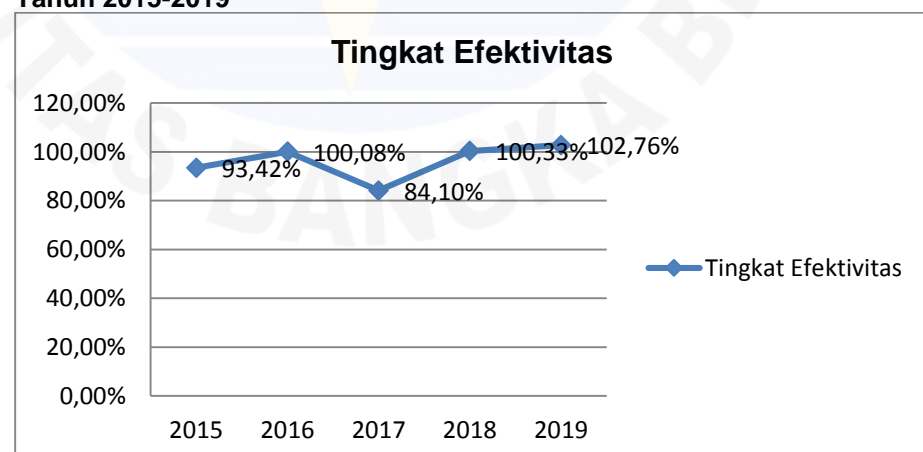
Berdasarkan rumus yang telah dikemukakan sebelumnya hasil analisis efektivitas keuangan daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

Tabel IV.2 Efektivitas Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2015	853.965.575.459,70	797.819.738.788,28	93,42	Efektif
2016	977.564.588.119,00	978.371.219.444,00	100,08	Efektif
2017	1.032.548.932.742,00	868.376.081.019,17	84,10	Cukup Efektif
2018	912.450.530.891,00	915.529.305.584,73	100,33	Efektif
2019	891.694.331.924,00	916.390.339.757,25	102,76	Sangat Efektif
Rata-rata Efektifitas			96,14	Efektif

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019, data diolah (2021)

Gambar IV.1 Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019, data diolah (2021)

Tabel IV.2 dan Gambar IV.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2015, 2016 dan 2018 tingkat efektivitas keuangan daerah Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan sebesar 93,42 persen, 100,08 persen dan 100,33 persen dengan kriteria efektif, namun mengalami penurunan pada Tahun 2017 sebesar 15,98 persen sehingga tingkat efektivitas keuangan Kota Pangkalpinang Tahun 2017 sebesar 84,10 persen dengan kriteria cukup efektif. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada Tahun 2019 yaitu sebesar 102,76 persen dengan kriteria sangat efektif, hal tersebut menggambarkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya. Tingkat efektivitas keuangan daerah Kota Pangkalpinang selama Tahun 2015-2019 memiliki rata-rata sebesar 96,14 persen dengan kriteria efektif.

4.2.2 Analisis Efisiensi

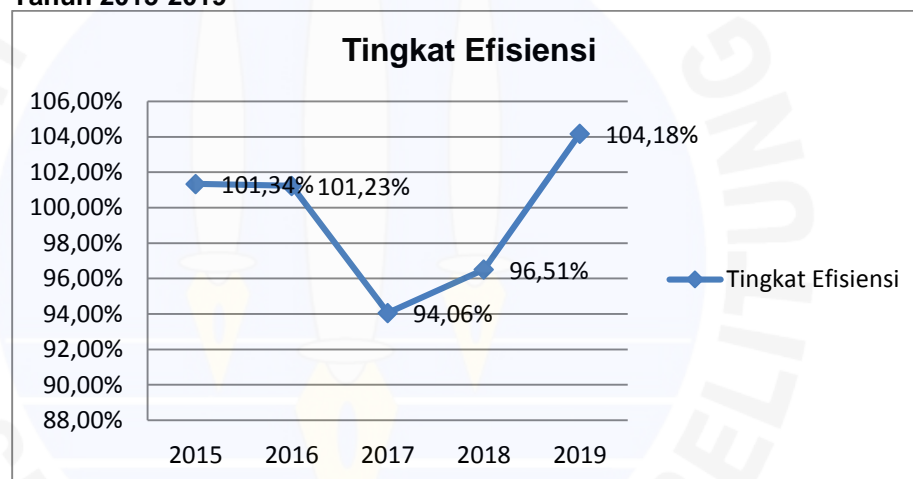
Analisis efisiensi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh hasil yang optimal. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan antara pengeluaran daerah dengan realisasi penerimaan daerah.

Berdasarkan rumus yang telah dikemukakan sebelumnya analisis efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

Tabel IV.3 Efisiensi Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019

Tahun	Pengeluaran Daerah (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
2015	808.541.648.446,64	797.819.738.788,28	101,34	Tidak Efisien
2016	990.400.876.899,00	978.371.219.444,00	101,23	Tidak Efisien
2017	816.819.790.496,16	868.376.081.020,17	94,06	Kurang Efisien
2018	883.544.427.973,98	915.529.305.584,73	96,51	Kurang Efisien
2019	954.727.423.814,72	916.390.339.757,25	104,18	Tidak Efisien
Rata-rata Efisiensi			99,46	Kurang Efisien

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019, data diolah (2021)

Gambar IV.2 Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019, data diolah (2021)

Tabel IV.3 dan Gambar IV.2 menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan dan peningkatan rasio efisiensi selama lima tahun. Pada Tahun 2015, 2016 dan 2017 terjadi penurunan efisiensi sebesar 101,34 persen menjadi 101,23 persen dengan kriteria tidak efisien. Kemudian menurun di Tahun 2017 menjadi 94,06 persen dengan kriteria kurang efisien. Pada Tahun 2018 dan 2019 hasil menunjukkan kembali mengalami peningkatan menjadi 96,51 persen dengan kriteria kurang

efisien dan 104,18 persen dengan kriteria tidak efisien. Hasil rata-rata tingkat efisiensi selama Tahun 2015-2019 sebesar 99,46 persen dengan kriteria kurang efisien.

4.2.3 Analisis Kebutuhan Fiskal

Kebutuhan fiskal digunakan untuk mengetahui kebutuhan dana Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan pelayanan mendasar dan menyeluruh. Semakin tinggi hasil indeks mengindikasikan semakin besar pula kebutuhan fiskal daerah. Kebutuhan fiskal dapat diukur dengan melakukan perbandingan antara pengeluaran aktual perkapita untuk jasa publik dan standar kebutuhan fiskal (Chodariyanti, 2015) :

Tabel IV.4 Kebutuhan Fiskal Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019

Tahun	PPP	%	SKF	%	IPPP
2015	4.120.965,37	-	194.590,91	-	21,18
2016	4.943.945,75	19,97	212.380,72	9,09	23,28
2017	3.996.339,34	19,17	235.528,28	10,90	16,97
2018	4.237.216,71	6,03	231.365,09	1,77	18,31
2019	4.488.040,65	5,92	255.912,18	10,61	17,54
Rata-rata					19,46

Sumber :

1. Laporan Realisasi Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019, data diolah (2021)
2. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2015-2019, data diolah (2021)

Tabel IV.4 menunjukkan bahwa kebutuhan fiskal Kota Pangkalpinang selama lima tahun mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada Tahun 2015 Indeks Pelayanan Publik Perkapita sebesar 21,18 kali dari Standar Kebutuhan Fiskal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada Tahun 2016 Indeks Pelayanan Publik Perkapita mengalami peningkatan menjadi 23,28 kali dari Standar Kebutuhan Fiskal provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2017

mengalami penurunan menjadi 16,97 kali dari Standar Kebutuhan Fiskal provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada Tahun 2018 Indeks Pelayanan Publik Perkapita mengalami peningkatan menjadi 18,31 kali dari Standar Kebutuhan Fiskal provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 17,54 kali dari Standar Kebutuhan Fiskal provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara keseluruhan Indeks Pelayanan Publik Perkapita di Kota Pangkalpinang rata-rata sebesar 19,46 kali dari Standar Kebutuhan Fiskal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.2.4 Analisis Indeks Kemampuan Rutin (IKR)

Indeks Kemampuan Rutin digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja rutin Kota Pangkalpinang. IKR dapat diukur dengan membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan total belanja rutin (Putri, 2017).

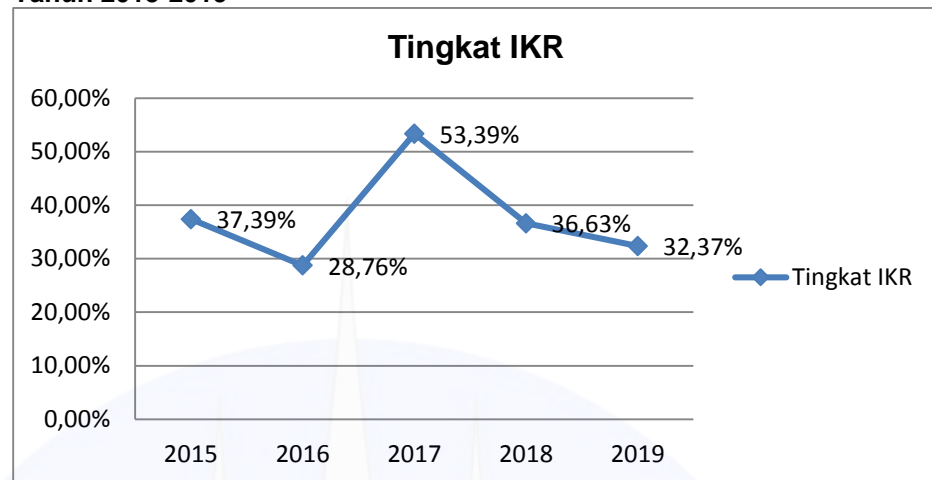
Berdasarkan rumus yang telah dikemukakan sebelumnya hasil analisis Indeks Kemampuan Rutin Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

Tabel IV.5 Indeks Kemampuan Rutin Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019

Tahun	PAD (Rp)	Total Belanja Rutin (Rp)	IKR (%)	Kriteria
2015	135.305.782.559,87	361.825.067.801,00	37,39	Kurang
2016	136.257.398.974,00	473.736.876.899,00	28,76	Kurang
2017	173.947.112.861,17	325.796.321.457,00	53,39	Cukup
2018	167.131.991.665,98	456.268.101.400,30	36,63	Kurang
2019	155.116.318.111,20	479.209.726.126,00	32,37	Kurang
Rata-rata IKR			37,71	Kurang

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019, data diolah (2021)

Gambar IV.3 Tingkat Indeks Kemampuan Rutin Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019, data diolah (2021)

Tabel IV.5 dan Gambar IV.4 menunjukkan bahwa pada Tahun 2015 ke 2016 terjadi penurunan sebesar 8,63 persen dari 37,39 persen menjadi 28,76 persen dengan kriteria kurang. Pada Tahun 2017 kembali mengalami peningkatan menjadi 53,39 persen dengan kriteria cukup. Pada Tahun 2018 dan 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 36,63 persen dan 32,37 persen berbanding lurus dengan adanya penurunan PAD dua tahun terakhir. Hasil rata-rata tingkat Indeks Kemampuan Rutin selama Tahun 2015-2019 sebesar 37,71 persen dengan kriteria kurang.

4.2.5 Analisis Share and Growth

Share and Growth digunakan untuk mengetahui peran pendapatan asli daerah dalam total belanja serta kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan tingkat pertumbuhan

pendapatan asli daerah. Untuk menghitung *Share and Growth* (Faud, 2016).

Berdasarkan hasil perhitungan *Share and Growth* Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

Tabel IV.6 Share Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019

Tahun	PAD (Rp)	Total Belanja (Rp)	Share (%)
2015	135.305.782.559,87	808.541.648.446,64	16,73
2016	136.257.398.974,00	990.400.876.899,00	13,76
2017	173.947.112.861,17	816.819.790.496,16	21,30
2018	167.131.991.665,98	883.544.427.973,98	18,92
2019	155.116.318.111,20	954.727.423.814,72	16,25
Rata-rata			17,39

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019, data diolah (2021)

Tabel IV.7 Growth Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019

Tahun	PADi (Rp)	PADi-1 (Rp)	Growth (%)
2015	135.305.782.559,87	-	-
2016	136.257.398.974,00	135.305.782.559,87	0,70
2017	173.947.112.861,17	136.257.398.974,00	27,66
2018	167.131.991.665,98	173.947.112.861,17	(3,92)
2019	155.116.318.111,20	167.131.991.665,98	(7,19)
Rata-rata			4,31

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019, data diolah (2021)

Tabel IV.6 menunjukkan tingkat *Share* Kota Pangkalpinang selama lima tahun yang bersifat fluktuatif. *Share* tertinggi terjadi pada Tahun 2017 sebesar 21,30 persen dan *Share* terendah terjadi pada Tahun 2016 sebesar 13,76 persen. Pada Tabel IV.7 menunjukkan tingkat *Growth* pendapatan asli daerah Kota Pangkalpinang yang mengalami peningkatan dan penurunan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2017 sebesar 27,66 persen dan terendah pada Tahun 2019 sebesar (7,19) persen.

Dari hasil *Share and Growth* Tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat *Share* sebesar 17,39 persen dan hasil rata-rata

tingkat *Growth* sebesar 4,31 persen. Hal tersebut jika kita interpretasikan menggunakan peta kemampuan keuangan maka Kota Pangkalpinang berada pada kuadran IV.

4.2.6 Analisis Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

4.2.6.1 Indeks Growth

Indeks *Growth* digunakan untuk mengetahui pertumbuhan PAD setiap tahunnya dalam mempertahankan tingkat pertumbuhannya.

Berikut hasil Indeks *Growth* Kota Pangkalpinang selama lima tahun :

Tabel IV.8 Indeks Growth Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019

Tahun	PAD (Rp)	Kondisi Maksimal	Kondisi Minimal	Indeks
2015	135.305.782.559,87	173.947.112.861,17	135.305.782.559,87	0,0000
2016	136.257.398.974,00	173.947.112.861,17	135.305.782.559,87	0,0260
2017	173.947.112.861,17	173.947.112.861,17	135.305.782.559,87	1,0000
2018	167.131.991.665,98	173.947.112.861,17	135.305.782.559,87	0,8686
2019	155.116.318.111,20	173.947.112.861,17	135.305.782.559,87	0,5407
Jumlah				2,4353

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019, data diolah (2021)

$$XG = \frac{\text{Jumlah indeks}}{n \text{ tahun}} = \frac{2,4353}{5} = 0,4871$$

4.2.6.2 Indeks Elastisitas

Indeks Elastisitas untuk mengukur pendapatan asli daerah terhadap belanja langsung yang bertujuan untuk melihat elastisitas atau sensitivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut hasil

Indeks Elastisitas Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019 :

Tabel IV.9 Indeks Elastisitas Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019

Tahun	Nilai	Kondisi Maksimal	Kondisi Minimal	Indeks
2015	0,3029	0,3912	0,2637	0,3075
2016	0,2637	0,3912	0,2637	0,0000
2017	0,3543	0,3912	0,2637	0,7208
2018	0,3912	0,3912	0,2637	1,0000
2019	0,3262	0,3912	0,2637	0,4902
Jumlah				2,5185

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019, data diolah (2021)

$$XE = \frac{\text{Jumlah indeks}}{\text{n tahun}} = \frac{2,5185}{5} = 0,5037$$

4.2.6.3 Indeks *Share*

Indeks *Share* untuk mengukur kemampuan PAD dalam membiayai belanja daerah. Berikut hasil Indeks *Share* Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019 :

Tabel IV.10 Indeks *Share* Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019

Tahun	Nilai	Kondisi Maksimal	Kondisi Minimal	Indeks
2015	0,1673	0,2130	0,1376	0,3939
2016	0,1376	0,2130	0,1376	0,0000
2017	0,2130	0,2130	0,1376	1,0000
2018	0,1892	0,2130	0,1376	0,6844
2019	0,1625	0,2130	0,1376	0,3302
Jumlah				2,4085

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019, data diolah (2021)

$$XS = \frac{\text{Jumlah indeks}}{\text{n tahun}} = \frac{2,4085}{5} = 0,4817$$

4.2.6.4 Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

$$IKK = \frac{XG + XE + XS}{3}$$

$$IKK = \frac{0,4871 + 0,5037 + 0,4817}{3}$$

$$IKK = 0,4908$$

Hasil perhitungan menunjukkan Indeks Kemampuan Keuangan Kota Pangkalpinang sebesar 0,4908. Jika dilihat perbandingan antara ketiga indeks tersebut Indeks Elastisitas tertinggi yaitu sebesar 0,5037, kemudian Indeks *Growth* sebesar 0,4871 dan yang terakhir Indeks *Share* sebesar 0,4917. Untuk hasil IKK menggambarkan bahwa

tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Pangkalpinang masuk kategori tinggi.

4.3 Pembahasan

1. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Tabel IV.2 menunjukkan bahwa target penerimaan daerah Kota Pangkalpinang selama Tahun 2015-2019 mengalami peningkatan dan penurunan. Pada Tahun 2015 target penerimaan daerah yang dianggarkan sebesar Rp.853.965.575.459,70 kemudian mengalami peningkatan sebesar 14,47 persen pada Tahun 2016. Tahun 2017 target anggaran kembali mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 5,62 persen. Selama dua tahun terakhir yaitu Tahun 2018 dan 2019 kembali mengalami penurunan sebesar 11,63 persen pada Tahun 2018 dan mengalami penurunan sebesar 2,27 persen pada tahun 2019.

Pada Tahun 2015-2019 realisasi penerimaan Daerah Kota Pangkalpinang juga mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada Tahun 2015 realisasi penerimaan daerah sebesar Rp.797.819.738.788,28 dan mengalami pertumbuhan sebesar 22,63 persen pada Tahun 2016. Pada Tahun 2017 realisasi penerimaan daerah Kota Pangkalpinang mengalami penurunan sebesar 11,24 persen. Tahun 2018 dan 2019 realisasi penerimaan kembali mengalami pertumbuhan sebesar 5,43 persen di Tahun 2018 dan pertumbuhan sebesar 0,10 persen di Tahun 2019.

Hasil perhitungan tingkat efektivitas keuangan daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019 mengalami perkembangan yang baik. Pada Tahun 2015 efektivitas yang diperoleh sebesar 93,42 persen dengan kriteria efektif. Pada Tahun 2016 tingkat efektivitas mengalami peningkatan menjadi 100,08 persen dengan kategori efektif. Pada Tahun 2017 tingkat efektivitas yang diperoleh mengalami penurunan menjadi sebesar 84,10 persen dengan kriteria cukup efektif. Pada Tahun 2018 dan 2019 tingkat efektivitas mengalami peningkatan kembali sebesar 100,33 persen pada Tahun 2018 dan sebesar 102,76 persen pada Tahun 2019 dengan kriteria efektif dan sangat efektif.

Secara keseluruhan tingkat efektivitas keuangan daerah Kota Pangkalpinang selama Tahun 2015-2019 sebesar 96,14 persen dengan kriteria efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kota Pangkalpinang mampu merealisasikan target penerimaan daerah atau mampu mencapai tujuan dengan baik secara keseluruhan. Meskipun penerimaan yang mendominasi total penerimaan daerah adalah dana transfer pusat, hal tersebut menggambarkan bahwa PAD belum mampu berkontribusi dengan optimal, pemerintah harus mampu menggali potensi-potensi daerah seperti potensi dari sektor industri pengolahan, sektor perkebunan (seperti karet, sawit dan lada), sektor perikanan, sektor

perdagangan dan jasa, sektor perumahan agar mampu berkontribusi lebih besar terhadap total penerimaan daerah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Bisma & Susanto, (2010) di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan hasil efektivitas dengan kriteria sangat efektif karena efektivitas pendapatan daerah selama lima tahun rata-rata sebesar 102,14 persen sehingga pencapaian tersebut perlu dipertahankan dalam pengelolaan APBD.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ningtias *et al.*, (2016) di Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil efektivitas pendapatan daerah selama Tahun 2012-2016 rata-rata sebesar 127,56 persen sehingga dapat dikategorikan sangat efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Sijabat *et al.*, (2012) di Kota Malang menunjukkan hasil efektivitas pendapatan daerah selama lima tahun rata-rata sebesar 107,68 persen sehingga dapat dikategorikan sangat efektif.

2. Efisiensi Keuangan Daerah

Tabel IV.3 menunjukkan tingkat pengeluaran daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada Tahun 2015 pengeluaran daerah Kota Pangkalpinang sebesar Rp.808.541.648.447 mengalami pertumbuhan sebesar 22,50 persen pada Tahun 2016, namun mengalami penurunan pada Tahun 2017 sebesar 17,53 persen. Selama dua tahun terakhir yaitu Tahun 2018 dan 2019 mengalami

peningkatan pengeluaran daerah yaitu sebesar 8,17 persen pada Tahun 2018 dan meningkat sebesar 8,06 persen pada Tahun 2019.

Tingkat realisasi penerimaan daerah Kota Pangkalpinang selama lima tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Pada Tahun 2015 realisasi penerimaan yang diperoleh sebesar Rp.797.819.738.788 kemudian meningkat sebesar 22,63 persen pada Tahun 2016, hal tersebut menggambarkan adanya peningkatan kearah yang lebih baik namun, pada Tahun 2017 realisasi penerimaan kembali mengalami penurunan sebesar 11,24 persen. Pada Tahun 2018 dan 2019 realisasi penerimaan kembali mengalami pertumbuhan sebesar 5,43 persen dan 0,10 persen.

Berdasarkan tabel IV.3 menunjukkan hasil perhitungan tingkat efisiensi keuangan daerah Kota Pangkalpinang selama Tahun 2015-2019. Pada Tahun 2015, 2016 dan 2019 efisiensi yang diperoleh sebesar 101,34 persen, 101,23 persen dan 104,18 persen dengan kriteria tidak efisien. Pada Tahun 2017 dan 2018 diperoleh tingkat efisiensi sebesar 94,06 persen dan 96,51 persen dengan kriteria kurang efisien. Setidaknya selama dua tahun tersebut tingkat efisiensi mengalami sedikit perkembangan kearah yang lebih baik.

Secara keseluruhan rata-rata tingkat efisiensi yang diperoleh Kota Pangkalpinang selama lima tahun sebesar 99,46 persen dengan kriteria kurang efisien. Dari hasil tersebut menggambarkan

bahwa pemerintah Kota Pangkalpinang masih belum mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik dan optimal dalam mencapai hasil penerimaan daerah yang diharapkan. Hal tersebut terjadi karena pengeluaran daerah Kota Pangkalpinang selama Tahun 2015, 2016 dan 2019 lebih besar dibandingkan dengan penerimaan yang diperoleh. Meskipun Pada Tahun 2017 dan 2018 Kota Pangkalpinang dapat menekan belanjanya namun realisasi penerimaan yang diperoleh masih belum optimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pengelolaan belanja daerah masih kurang efisien karena belum mampu menekan belanja daerahnya. Belanja yang mendominasi besarnya pengeluaran daerah adalah belanja pegawai.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Trianto, (2013) di Kota Palembang menunjukkan hasil yang kurang efisien dan tidak efisien. Hal tersebut dikarenakan belanja daerah melebihi anggaran yang tersedia sehingga pengeluaran belanja tersebut dibiayai dengan pinjaman.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Martati, (2017) di Kutai Kertanegara menunjukkan tingkat efisiensi dengan kriteria kurang efisien dan tidak efisien. Hal tersebut dikarenakan pengeluaran yang lebih besar yang mengakibatkan defisit anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Pilat & Morasa, (2017) di Kota Manado

menunjukkan tingkat efisiensi masuk kategori sangat efisien dengan hasil rata-rata 0,835 persen.

3. Kebutuhan Fiskal

Tabel IV.4 menunjukkan tingkat pengeluaran aktual perkapita untuk jasa publik mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada Tahun 2015 pengeluaran publik perkapita sebesar Rp.4.120.965,37 dan mengalami pertumbuhan sebesar 19,97 persen pada Tahun 2016. Pada Tahun 2017 pengeluaran aktual perkapita mengalami penurunan sebesar 19,17 persen, dan pada tahun 2018 dan 2019 pengeluaran aktual perkapita kembali mengalami pertumbuhan sebesar 6,03 persen dan 5,92 persen.

Tingkat standar kebutuhan fiskal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada Tahun 2015 standar kebutuhan fiskal Bangka Belitung sebesar Rp.194.590,91 dan meningkat sebesar 9,09 persen pada Tahun 2016. Pada Tahun 2017 standar kebutuhan fiskal kembali meningkat sebesar 10,90 persen dan pada Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1,77 persen. Tahun 2019 standar kebutuhan fiskal kembali meningkat sebesar 10,61 persen sekaligus sebagai standar kebutuhan fiskal tertinggi dari tahun sebelumnya.

Hasil perhitungan tingkat kebutuhan fiskal Kota pangkalpinang berdasarkan tabel IV.6 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada Tahun 2015 indeks pelayanan

publik perkapita sebesar 21,18 kali dari standar kebutuhan fiskal Provinsi Bangka Belitung. Meningkat di Tahun 2016 menjadi 23,28 kali dari standar kebutuhan fiskal provinsi. Pada Tahun 2017 kembali mengalami penurunan sehingga indeks pelayanan publik perkapita Kota Pangkalpinang sebesar 16,97 kali dari standar kebutuhan fiskal provinsi. Pada Tahun 2018 dan 2019 tingkat indeks pelayanan publik perkapita kembali meningkat menjadi 18,31 kali dari standar kebutuhan fiskal provinsi pada Tahun 2018 dan kembali menurun pada Tahun 2019 menjadi 17,54 kali dari standar kebutuhan fiskal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara keseluruhan rata-rata kebutuhan fiskal Kota Pangkalpinang untuk indeks pelayanan publik perkapita sebesar 19,46 kali lebih besar dari rata-rata kebutuhan standar se-Bangka Belitung.

Adanya penurunan indeks pelayanan publik perkapita Tahun 2017 dan 2019 disebabkan oleh tingkat pengeluaran daerah yang menurun kemudian jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga perhitungan kebutuhan fiskal mengalami penurunan. Ada beberapa belanja daerah yang memang tidak ada pengeluaran sama sekali yaitu untuk belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja keuangan yang bernilai Rp.0 pada Tahun 2017. Semakin besar tingkat kebutuhan fiskal suatu daerah

Kabupaten/Kota hal tersebut menunjukkan semakin boros pengeluaran setiap penduduk suatu daerah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Chodariyanti, (2015) di Kabupaten Lamongan menunjukkan hasil kebutuhan fiskal Kabupaten Lamongan yang sangat tinggi. Hal tersebut terjadi karena pengeluaran pembangunan yang sangat tinggi disamping pengeluaran rutin yang terus meningkat. Penelitian lain yang dilakukan oleh Melalolin, *et al* (2016) di Kabupaten Maluku Tenggara Barat menunjukkan hasil kebutuhan fiskal Kabupaten Maluku yang tinggi yaitu 61 kali lebih besar dari rata-rata kebutuhan standar se-Maluku.

Penelitian yang dilakukan oleh Pujawati, *et al* (2019) di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan hasil kebutuhan fiskal yang sangat tinggi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan adanya tuntutan pembangunan yang semakin besar dibarengi dengan adanya jumlah penduduk yang terus meningkat.

4. Indeks Kemampuan Rutin (IKR)

Tabel IV.5 menunjukkan bahwa PAD Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan dan penurunan selama Tahun 2015-2019. Pada Tahun 2015 PAD yang diperoleh sebesar Rp.135.305.782.559,87 dan meningkat sebesar 0,70 persen pada tahun 2016. Tahun 2017 PAD mengalami pertumbuhan kembali

sebesar 27,66 persen dan merupakan PAD tertinggi selama lima tahun. Pada Tahun 2018 dan 2019 PAD kembali mengalami penurunan sebesar 3,92 persen di tahun 2018 dan menurun sebesar 7,19 persen di tahun 2019.

Tingkat belanja rutin Kota Pangkalpinang selama Tahun 2015-2019 juga mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada Tahun 2015 total belanja rutin yang dikeluarkan sebesar Rp.361.825.067.801 dan meningkat sebesar 30,93 persen pada Tahun 2016 namun, pada Tahun 2017 total belanja rutin mengalami penurunan sebesar 31,29 persen. Pada Tahun 2018 dan 2019 total belanja rutin kembali meningkat sebesar 40,05 persen pada Tahun 2018 serta pertumbuhan sebesar 5,03 persen tahun 2019 dan merupakan belanja rutin tertinggi selama lima tahun.

Berdasarkan tabel IV.5 Hasil perhitungan tingkat indeks kemampuan rutin Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019 mengalami perkembangan yang naik turun. Pada Tahun 2015 IKR yang diperoleh sebesar 37,39 persen kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2016 menjadi 28,76 persen dengan kriteria kurang. Pada Tahun 2017 IKR kembali meningkat menjadi 53,39 persen dengan kriteria cukup. Tahun 2018 dan 2019 kembali mengalami penurunan sebesar 36,63 persen dan 32,37 persen dengan kriteria kurang.

Secara keseluruhan rata-rata tingkat IKR Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019 sebesar 37,71 persen dengan kriteria kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah belum mampu membiayai belanja rutin daerah secara optimal dikarenakan pendapatan asli daerah yang diperoleh masih rendah. Sedangkan tingkat belanja rutin mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan dengan PAD Kota Pangkalpinang terutama dalam belanja pegawai. Pemerintah Kota Pangkalpinang harus mampu menggali lagi potensi yang dimiliki daerah secara optimal untuk meningkatkan PAD Kota Pangkalpinang kedepannya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahman, *et al* (2014) di Kota Manado dan Kota Bitung menunjukkan hasil Indeks Kemampuan Rutin yang masih kurang. Tingkat kemampuan PAD Kota Manado dan Bitung dalam membiayai pengeluaran rutin masih sangat rendah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Koesariyanto & Ervina, (2015) di Kabupaten Blitar menunjukkan hasil Indeks Kemampuan Rutin yang sangat kurang yaitu dibawah 10 persen, disebabkan oleh ketergantungan yang masih besar terhadap pemerintah pusat.

Penelitian yang dilakukan oleh Vurry, *et al* (2014) di Kabupaten Buleleng menunjukkan hasil Indeks Kemampuan Rutin

Kabupaten Buleleng masuk kategori sangat kurang berada pada angka 10,05 persen.

5. *Share and Growth*

Berdasarkan tabel IV.6 menunjukkan hasil perhitungan *share* Kota Pangkalpinang selama lima tahun. Pada Tahun 2015 perolehan hasil *Share* sebesar 16,73 persen. Pada Tahun 2016 diperoleh hasil *Share* sebesar 13,76 persen lebih rendah dari Tahun 2015. Pada Tahun 2017 diperoleh hasil *Share* sebesar 21,30 persen mengalami peningkatan dibanding dua tahun sebelumnya. Pada Tahun 2018 diperoleh hasil *Share* sebesar 18,92 persen. Pada Tahun 2019 diperoleh hasil *Share* sebesar 16,25 persen.

Tingkat *Growth* Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019 mengalami perkembangan naik turun. Pada Tahun 2015 ke 2016 *Growth* atau laju pertumbuhan PAD sebesar 0,70 persen. Pada Tahun 2017 laju pertumbuhan PAD sebesar 27,66 persen meningkat dari *Growth* Tahun 2016. Namun, pada Tahun 2018 dan 2019 laju pertumbuhan PAD mengalami penurunan yaitu sebesar 3,92 persen dan 7,19 persen.

Secara keseluruhan rata-rata *Share dan Growth* yang diperoleh sebesar 17,39 persen dan 4,31 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran atau kontribusi PAD dalam membiayai total belanja daerah belum optimal karena *Share* masih rendah serta untuk tingkat *Growth* juga rendah artinya pemerintah belum

mampu menggali potensi PAD. Jika menggunakan peta kemampuan keuangan *Share and Growth* Kota Pangkalpinang selama Tahun 2015-2019 berada pada kuadran IV, dimana menunjukkan kondisi yang paling buruk, dalam artian PAD masih rendah, serta zona pertumbuhan potensial PAD juga masih rendah sehingga kecilnya peluang untuk mengembangkan potensi lokal daerah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pilat & Morasa, (2017) di Kota Manado menunjukkan hasil perhitungan *Share and Growth* berada pada posisi kuadran II yang berarti berada pada kondisi belum ideal. Penelitian lain yang dilakukan oleh Chasanah & Panjawa, (2020) di Kota Magelang menunjukkan hasil perhitungan *Share and Growth* berada pada posisi kuadran III yang berarti belum juga ideal.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningtias, *et al* (2016) di Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil perhitungan *Share and Growth* berada pada posisi kuadran II yang menunjukkan kondisi belum ideal.

6. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Hasil perhitungan Indeks Growth Tahun 2015-2019 berdasarkan tabel IV.8 menunjukkan bahwa pada Tahun 2015 diperoleh Indeks sebesar 0,0000 dikarenakan nilai PAD dengan kondisi minimal sama. Pada Tahun 2016 diperoleh Indeks sebesar

0,0260. Pada Tahun 2017 dan 2018 diperoleh Indeks sebesar 1,0000 dan 0,8686. Pada Tahun 2019 diperoleh Indeks sebesar 0,5407. Secara keseluruhan hasil rata-rata yang diperoleh dari Indeks Growth sebesar 0,4871.

Hasil perhitungan Indeks Elastisitas Tahun 2015-2019 berdasarkan tabel IV.9 menunjukkan bahwa pada Tahun 2015 diperoleh Indeks sebesar 0,3075. Pada Tahun 2016 diperoleh Indeks sebesar 0,0000 dikarenakan nilai dengan kondisi minimal sama. Pada Tahun 2017 dan 2018 diperoleh Indeks sebesar 0,7208 dan 1,0000. Pada Tahun 2019 diperoleh Indeks sebesar 0,4902. Secara keseluruhan hasil rata-rata yang diperoleh dari Indeks Elastisitas sebesar 0,5037.

Hasil perhitungan Indeks Share Tahun 2015-2019 berdasarkan tabel IV.10 menunjukkan bahwa pada Tahun 2015 diperoleh Indeks sebesar 0,3939. Pada Tahun 2016 diperoleh Indeks sebesar 0,0000. Pada Tahun 2017 dan 2018 diperoleh Indeks sebesar 1,0000 dan 0,6844. Pada Tahun 2019 diperoleh Indeks sebesar 0,3302. Secara keseluruhan hasil rata-rata yang diperoleh dari Indeks Share sebesar 0,4817.

Hasil perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019 sebesar 0,4908. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indeks Kemampuan Keuangan Kota Pangkalpinang tinggi, disebabkan karena masih adanya bantuan

dana transfer dari pusat yang cukup besar. Hal tersebut dibuktikan dengan masih rendahnya tingkat PAD Kota Pangkalpinang sehingga masih bergantung pada dana pusat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pilat & Morasa, (2017) di Kota Manado menunjukkan hasil sebesar 0,557 yang berarti indeks kemampuan keuangan tergolong tinggi karena adanya bantuan dana transfer pusat yang besar dan hal tersebut bertolak belakang dengan amanat otonomi yang menuntut kemandirian suatu daerah. Penelitian lain dilakukan oleh Farhani & Rosnidah, (2018) di Kota Cirebon menunjukkan hasil sebesar 0,562 yang berarti Indeks Kemampuan Keuangan Kota Cirebon masuk kategori tinggi. Hal tersebut dikarenakan adanya bantuan subsidi yang besar dari pemerintah pusat. Penelitian yang dilakukan oleh Chasanah & Panjawa, (2020) di Kota Magelang menunjukkan hasil sebesar 46,25 persen hal tersebut berarti tingkat Indeks Kemampuan Keuangan Kota Magelang tergolong tinggi.